

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DIY Tahun 2007-2013)**

Swastika Enjang Prasasti, Ratna Purnama Sari

Universitas PGRI Yogyakarta, Jl. PGRI I No. 117 Sonosewu, Yogyakarta.

E-mail: pswastikaenjang@ymail.com

Abstract

The aim of this research is to test whether local own-source revenue (PAD) and the Fund Balance have an effect to government's financial performance of regencies in DIY. This research was held for giving public administration, organizational theory and governmental accounting's knowledge. This research also held based on the un optimal financial performance in order to adequate public's need. The research is using budget realization report of DIY regency on 2007-2013 published by Dinas Perimbangan and using 30 samples of data. The data were analyzed by quantitative method and tested by multiple linear regression. The result shows that the local own-source revenue (PAD) and the Fund Balance giving a simultaneous effect on financial performance partially, local own-source revenue (PAD) has a positive significant effect while fund balance has a negative significant effect on government's financial performance of DIY.

Keywords: *Local Own-Source Revenue (PAD), Fund Balance (DP), Financial Performance.*

Pendahuluan

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu Ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi. Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih

rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang dari pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi (Mardiasmo, 2010).

Penyelenggaraan desentralisasi terkait dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, salah satunya adalah pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahannya masing-masing. Selaras dengan tujuan otonomi dan *outcome*, penyusunan APBD bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah yaitu menuntun kemandirian suatu daerah sehingga upaya harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah dan sumber dana bagi daerah dalam rangka membiayai aktifitas operasional pemerintah daerah melalui Pendapatan Asli Daerah

yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, dan sumber dana daerah melalui dana perimbangan yaitu dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan pendapatan transfer.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Bastian, 2012).

Selain Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi tersebut. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan (Bastian, 2012). Apabila pengelolaan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri.

Berdasarkan temuan bukti-bukti audit dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

II BPK-RI, masih terlihat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih buruk dan dapat dinilai belum baik, untuk itu diperlukan sebuah penelitian tentang "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". Salah satu instrumen untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan disahkan. Menurut Halim (2007), pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, salah satunya dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Sehingga dapat diketahui tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatannya.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman

mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam pengetahuan ilmu akuntansi pemerintahan khususnya dalam pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Bagi Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Kajian Teori

Kinerja Keuangan

Akuntabilitas yang merupakan salah satu ciri-ciri terapan *good governance* bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Hamzah, 2008). Sedangkan efektif merupakan tingkat standar kinerja atau program dengan target yang telah ditetapkan yang merupakan perbandingan-perbandingan *outcome* dengan *output*.

Analisis keuangan menurut Halim (2007) merupakan salah satu usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis kinerja keuangan dapat diukur dengan penghitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan. Salah satu pengukuran kinerja keuangan tersebut berdasarkan tingkat kemandirian keuangan. Kemandirian

Keuangan adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman (Bisma & Susanto, 2010).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Isidjoso, 2002). Berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan oleh masyarakat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Komponen PAD seperti retribusi daerah dan pajak secara langsung maupun tidak langsung akan membebani rakyat, oleh karena itu komponen tersebut harus mendapatkan perhatian khusus.

Yuwono (2005) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas mengenai pendapatan, telah dikemukakan beberapa definisi mengenai pendapatan daerah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran mendefinisikan bahwa pendapatan sebagai semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana

lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 32 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber-sumber pendapatan bagi daerah, terdiri atas (pasal 157 dan 159) antara lain:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 1. Hasil pajak daerah.
 2. Hasil retribusi daerah.
 3. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan.
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
- b. Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Otonomi daerah hingga saat ini masih memberikan berbagai permasalahan. Kondisi geografis dan kekayaan alam yang beragam, deffersial potensi daerah, yang menciptakan perbedaan kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhannya, atau yang biasa disebut *fiscal gap* (celah fiskal).

Menurut Permendagri No. 32 Tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan

daerah dan antar daerah agar tidak ada satu daerah yang tertinggal, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Dana perimbangan dalam UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 33/2004 adalah terdiri dari (a) Dana Bagi Hasil (b) Dana Alokasi Umum (c) Dana Alokasi Khusus.

Rumusan Hipotesis

1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan memiliki peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Penurunan PAD akan menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah. Begitu juga sebaliknya, peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai daerah akan meningkatkan PAD sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah tidak terhambat (Hamara, 2010). Sedangkan Julitawati (2012) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hal ini memberikan indikasi kuat bahwa penelitian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

H₁: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

2. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja Keuangan.

Penelitian yang dilakukan Dian (2009) menyimpulkan bahwa hanya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah saja yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian Wenny (2012) menyatakan bahwa hanya lain-lain PAD yang sah dan yang dominan

mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan dan kekayaan tidak dominan yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara penelitian Suprianto (2013) dengan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan (berdasarkan tingkat kemandirian) selama periode 2003-2012. Dari uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

3. Hubungan antara Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan.

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan khususnya DAU juga mempunyai peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dalam memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2010). Penelitian Rukmana (2013) hasil pajak daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan dana perimbangan dan retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Membuktikan semakin kecil dana perimbangan yang diberikan maka akan menunjukkan kinerja keuangan semakin baik, sebaliknya semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah semakin turun. Penggunaan dana perimbangan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Semakin besar penerimaan dana yang diperoleh maka akan mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini memotivasi pemerintah untuk lebih memperhatikan dalam penerimaan dana yang diperoleh.

H₃: Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Metode Penelitian

Metode Penentuan Subyek

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, artinya setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan kinerja keuangan dengan data lengkap dan telah dipublikasikan pada tahun 2007-2013.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengambil data dengan menggunakan metode data sekunder, data diperoleh dengan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data dengan mengambil sampel yaitu sebanyak 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang melaporkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tiap tahun dengan data lengkap untuk periode 2007-2013.

Teknik Analisis Data

Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan asumsi klasik. Asumsi klasik yang harus terpenuhi dalam model regresi linier yaitu residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya heteroskedastisitas dan tidak adanya

autokorelasi pada model regresi. Harus terpenuhinya asumsi klasik karena ditujukan untuk memperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji simultan (F), uji parsial (t), dan model persamaan regresi.

Uji Simultan

Uji F atau uji koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012), yaitu jika $p\text{-value} < 0,05$ maka terdapat pengaruh antara variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terkait. Uji F dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yaitu pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan.

Uji Parsial

Menurut Priyatno (2012) uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Penelitian ini, uji t dilakukan untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan (x) secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah (Y). Jika $p\text{-value} < 0,05$ maka hipotesis diterima.

Persamaan Regresi

Model persamaan regresi yang digunakan adalah dengan model analisis regresi linier berganda, yaitu regresi yang memiliki

satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen, yang bertujuan untuk mendeteksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah.

X₁ = Pendapatan Asli Daerah.

X₂ = Dana Perimbangan.

a = Konstanta.

b = Koefisien Regresi.

e = *error*.

Koefisien Determinasi

Pengukuran koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Pengukuran ini untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model (Priyatno, 2012). Jika dalam regresi menggunakan dua atau lebih variabel independen maka pengukuran koefisien determinasi akan menggunakan *Adjusted R Square*, dengan tujuan untuk mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antar variabel dalam model yang digunakan. Nilai *Adjust R Square* berkisar 0-1. Semakin mendekati 1, maka menunjukkan penjelas (X) yang kita miliki semakin baik menjelaskan variasi dari variabel respon (Y).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel.

	N	Min	Max	Mean	Std.Dev
PAD	30	28.878	338.284	122.468,30	90.589,975
DP	30	441.229	946.821	631.368,97	130.677,504
KK	30	0,05	0,56	0,1893	0,13318

Sumber: Data sekunder diolah, 2014.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum Rp. 28.878.000,00 yang menunjukkan Pendapatan Asli Daerah terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2007 yaitu Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan nilai maksimum Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 338.284.000,00 yang menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi pada tahun 2012 adalah Kota Yogyakarta, dengan nilai rata-rata selama tujuh tahun sebesar Rp. 122.468.300,00 serta jumlah sampel sebanyak 30 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kendati terjadi peningkatan kinerja PAD di kota Yogyakarta menunjukkan bahwa kota Yogyakarta memiliki tingkat kemandirian yang cukup besar dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

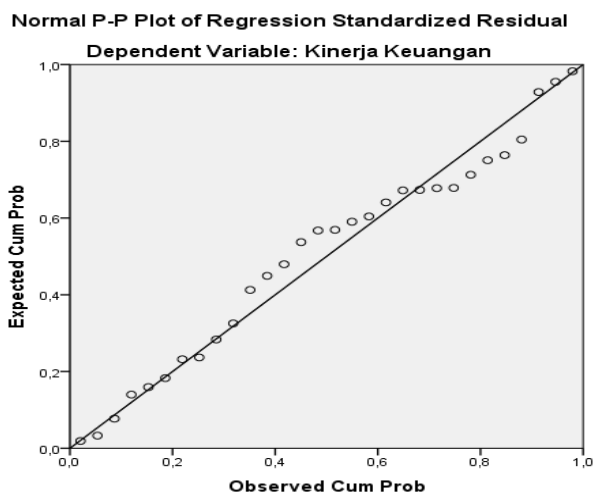
Variabel Dana Perimbangan memiliki nilai minimum sebesar Rp. 441.229.000,00 yang menunjukkan Dana Perimbangan terendah pada tahun 2007 yaitu di kabupaten Kulon Progo. Sedangkan nilai maksimum Dana Perimbangan sebesar Rp. 946.821.000,00 yang menunjukkan dana perimbangan tertinggi pada tahun 2012 yaitu di kabupaten Sleman, dengan nilai rata-rata Rp. 631.368.970,00 serta jumlah sampel sebanyak 30 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kinerja Keuangan memiliki nilai minimum 0,05 dan nilai maksimum 0,58 dengan nilai rata-rata sebesar 0,1893 serta jumlah

sampel sebanyak 30 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang artinya persentase PAD terhadap dana perimbangan sebesar 0,00-10,00 menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah sangat baik.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data sekunder diolah, 2014.

Gambar 1. Normal Probability Plot.

Berdasarkan hasil pengujian di atas, gambar grafik terlihat titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi telah memenuhi asumsi normalitas (Priyatno, 2012).

Hasil Uji Multikolinearitas

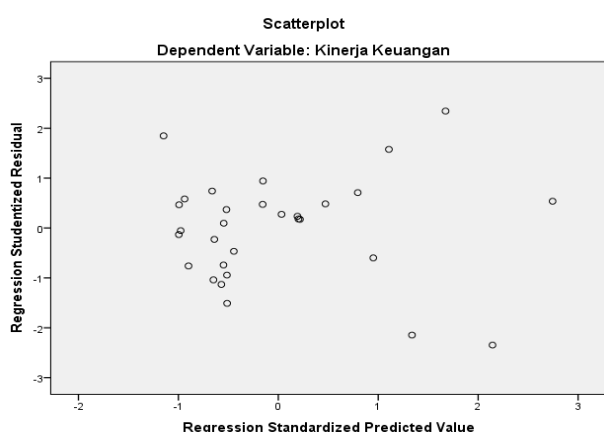
Tabel 2. Tabel Uji Analisis Data.

Model	B	T	Tolerane	VIF	Sig
Const	0,219	9,618			0,000
PAD	1,619E-006	28,649	0,776	1,288	0,000
Dp	-3,607E-007	-9,072	0,776	1,288	0,000
F	422,536				0,000
Adjst R ²	0,967				
D-W	2,473				

Dependent Variabel: Kinerja Keuangan.
 Sumber: Data sekunder diolah, 2014.

Berdasarkan tabel 2 hasil uji multikolinieritas, terlihat bahwa seluruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan memiliki angka *Variance Inflation Factors* (VIF) di bawah 10 dengan angka *tolerance* yang menunjukkan nilai lebih dari 0,10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi (Priyatno, 2012).

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data sekunder diolah, 2014.

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Berdasarkan gambar 2 grafik *scatterplot* terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu, titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi (Priyatno, 2012).

Hasil Pengujian Autokorelasi

Berdasarkan tabel 2 di atas ditunjukkan nilai DW sebesar 2,473. Nilai 2,473 merupakan hasil dari pengujian Durbin-Watson yang artinya nilai Durbin-Watson menunjukkan angka di atas +2 yang berarti terdapat autokorelasi negatif pada uji autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini telah terjadi autokorelasi dengan nilai DW sebesar 2,473 yang menunjukkan nilai DW di atas +2.

Hasil Pengujian Hipotesis

Setelah semua asumsi klasik dipenuhi maka dilakukan pengujian hipotesis, yaitu dengan:

Uji Simultan (F)

Pengujian hipotesis secara simultan dengan uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari variabel bebas X_1 dan X_2 terhadap variabel terkait Y (Priyatno, 2012). Uji F digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Pada tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) yang berarti secara simultan seluruh variabel independen PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja keuangan. Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan PAD dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2007-2013. Sehingga H_1 diterima.

Uji Parsial (t)

Pengujian hipotesis secara parsial dengan uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas X terhadap variabel Y. Pengujian dilakukan dengan melihat hasil signifikansi dari hasil uji t. Tabel 2 Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hasil t sebesar 28,649, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah 0,05 ($0,000 < 0,05$) menunjukkan bahwa H_2 diterima.

Sedangkan dana perimbangan hasil t sebesar -9,207 yang menunjukkan bahwa secara parsial dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

tahun 2007-2013. Nilai signifikansi 0,000 yang berada di bawah 0,05 ($0,000 < 0,05$) menunjukkan bahwa H3 diterima.

Model Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel 2 di atas maka persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan Pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,219 + 0,000001619 \text{ PAD} - 0,0000003607 \text{ DP} + e$$

Model persamaan regresi berganda di atas menunjukkan:

1. Y = Nilai konstanta sebesar 0,219, artinya apabila tidak ada variabel independen, maka kinerja keuangan sebesar 0,219.
2. B_1 sebesar 0,000001619 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% akan diikuti kenaikan kinerja sebesar 0,000001619 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. B_2 sebesar -0,0000003607 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Dana Perimbangan sebesar 1% akan diikuti penurunan kerja sebesar 0,0000003607 dengan asumsi variabel lain tetap.

Koefisien Determinasi

Adjusted R square digunakan untuk mengukur pengaruh jika dalam regresi menggunakan dua variabel atau lebih (Priyatno, 2014). Tabel 2 *Adjusted R square* atau koefisien korelasi sebesar 0,967. Artinya terdapat pengaruh yang kuat antara PAD dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan, dan koefisien determinasi sebesar 0,967, angka-angka tersebut berarti PAD dan dana Perimbangan memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan sebesar 96,7% dan sisanya sebesar 3,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dihitung dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa angka determinasi mendekati angka 1, maka menunjukkan variabel penjelas yang kita

miliki semakin baik dalam menjelaskan variasi dari variabel lain.

Pembahasan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hipotesis pertama menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen PAD dan dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja keuangan. Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan PAD dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2007-2013.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Julitawati (2012) yang membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Hasil ini memberikan indikasi kuat bahwa penelitian Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, artinya semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin baik kinerja keuangan daerah kabupaten/kota DIY sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Suprianto (2013), yang menemukan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dengan pemahaman bahwa kinerja keuangan menunjukkan kemampuan kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya dan semakin bertambahnya Pendapatan Asli Daerah

tiap tahunnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Oleh sebab itu daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini dapat terjadi pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menekankan hasil PAD yang berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam UU.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Rukmana (2013) yang menyebutkan bahwa dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Dana Perimbangan yang meliputi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pada pendapatan daerah maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat akan mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat

pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah semakin menurun.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DP) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di DIY, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2007-2013.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2007-2013.
3. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2007-2013.

Daftar Pustaka

- Bastian, I. (2012). *Akuntansi Sektor Publik suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bisma, I. & Susanto, H. (2010). "Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat". *GaneC Swara*. Edisi Khusus. Universitas Mataram, 1 (1): 75-86.
- Dian, N. (2009). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. (On-line), (<http://-repository-usu.ac.id>, diakses tanggal 4 Desember 2010). Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga.

- Jakarta: Salemba Empat.
- Halim & Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UUPP STIM YKPN.
- Hamara, Dwipayana Krisna. 2010. "Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya". *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi*, 1(1): 1-12.
- Hamzah, A. (2008). "Analisis Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006)". *Jurnal Akuntansi*. Madura: Universitas Trunojoyo.
- Isdijoso, B. (2002). "Analisis Kebijakan Fiskal pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)". *Kajian Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 6 No. 1.
- Julitawati, E., Darwanis & Jalaludin. 2012. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh". *Jurnal Akuntansi Pascasarjana*. 1 (1): 15-29. Banda Aceh: Universitas Syah Kuala.
- Mardiasmo. 2010. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Priyatno, D. (2012). *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Priyanto, D. (2014). *Pengolah Data Terpraktis SPSS 22*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rukmana, Vidi Wan. 2013. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau". *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi*. 1 (1): 1-15. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Sugiyono. 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suprianto. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo". *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Gorontalo: Universitas Gorontalo.
- Tap MPR No. XV. 1998. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: MPR.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 17. 2003. Jakarta: *Keuangan Negara*.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32. 2004. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 33. 2004. Jakarta: *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32. 2008. Jakarta: *Tujuan Dana Perimbangan*.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 22. 1999. Jakarta: *Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 25. 1999. Jakarta: *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 105. 2000. Jakarta: *Pengelolaan dan*

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

(1): 39-51.

Wenny, Cherrya Dhia. 2012. "*Analisis Pengaruh pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota*". Forum Bisnis dan Kewirausahaan. Jurnal Ilmiah STIE MDP, 1

www.djpk.depkeu.co.id

www.bpk.co.id

Yuwono, S. dkk. (2005), *Pengantar Sektor Publik*. Surabaya: Bayumedia Publishing.